



SEKILAS INFO PENYESUAIAN PIDANA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2026



A.Junaedi Karso

SEKILAS INFO PENYESUAIAN PIDANA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2026

Tentang Penulis



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.



Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-271-558-1



9 786342 715581

SEKILAS INFO PENYESUAIAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026

A.Junaedi Karso



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**SEKILAS INFO PENYESUAIAN PIDANA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sela Puspita Maharani

ISBN : 978-634-271-558-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2026**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2026

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada **"Allah SWT"** atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang *"Sekilas Info Penyesuaian Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026"*.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutip atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait *"Sekilas Info Penyesuaian Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026"* ini.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari berbagai sumber baik dari Ahi, buku, Artikel, jurnal, media *online* misalnya dandapala.com, hukumonline.com, katadata.co.id, kompas.id, kompas.com, tempo.co, bisnis.com, mahkamahagung.go.id, tribunnews.com, antaranews.com, sindonews.com, bphn.go.id, indonesiabaik.id, medikolegal.id, unesa.ac.id, waspada.id, unmer.ac.id, lawyer-ahdanramdani.com, dst. serta sumber-sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga **"Allah SWT"** membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENYESUAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ..1	
A. Latar Belakang Penyesuaian Pidana	1
B. Penyesuaian Pidana KUHP Baru 2026.....	16
C. Dasar Penyesuaian Pidana di Indonesia	26
BAB 2 KUHP DAN KUHAP BARU KARYA ANAK	
NEGERI BERLAKU.....	51
A. KUHP dan KUHAP Baru	51
B. Kesiapan Aparatur Penegak Hukum Indonesia	57
C. Status Keberlakuan PERMA 1/2020 setelah KUHP	
Nasional Berlaku.....	67
D. Langkah Kebijakan Hukum MA dalam	
Menerapkan KUHP Baru	77
BAB 3 KUHAP DAN KUHP BARU DAN DAMPAKNYA	
BAGI MASYARAKAT.....	84
A. Selamat Datang KUHAP dan KUHP Baru.....	84
B. Pasal yang Jadi Sorotan KUHP dan KUHAP	
Baru.....	103
C. KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Pemerintah	
Terbuka Masukan Publik	112
BAB 4 UNDANG-UNDANG PENYESUAIAN PIDANA	
INDONESIA.....	126
A. Rancangan Undang-Undang Penyesuaian	
Pidana	126
B. Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana Dikebut	132
C. Alasan Penyesuaian Pidana	138
D. Narkoba.....	174
E. Penyalahgunaan Narkoba Direhabilitasi.....	197
DAFTAR PUSTAKA.....	220
TENTANG PENULIS	239
LAMPIRAN	248

BAB 1 | PENYESUAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

A. Latar Belakang Penyesuaian Pidana

Latar belakang penyesuaian pidana di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, didorong oleh kebutuhan untuk menyelaraskan seluruh undang-undang sektoral di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan paradigma hukum pidana baru yang lebih modern dan adil. Berikut adalah poin-poin utama latar belakang penyesuaian hukum pidana di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023): KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem pidana, sehingga undang-undang pidana khusus di luar KUHP harus disesuaikan agar tidak bertentangan.
2. Perubahan Paradigma Pidana: Penyesuaian ini menggeser fokus dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan masyarakat.
3. Penghapusan Pidana Kurungan & Pengaturan Denda: Penyesuaian dilakukan untuk menghapus pidana kurungan, menyesuaikan kategori pidana denda, dan mengubah ketentuan pidana mati menjadi pidana alternatif dengan masa percobaan.

BAB 2 | KUHP DAN KUHP BARU KARYA ANAK NEGERI BERLAKU

A. KUHP dan KUHP Baru

1. Pengesahan KUHP dan KUHP

Jakarta-Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa, 18 November 2025, resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-undang (UU). Sidang yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 242 anggota dewan. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan melalui musyawarah, sehingga regulasi yang telah dibahas panjang itu ditetapkan sebagai undang-undang⁵.

Pengundangan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang diikuti pengesahan KUHP, serta pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengenai Penyesuaian Pidana pantas diapresiasi. *“Alhamdulillah, barokallah ya rabb. Akhirnya, Indonesia memiliki aturan hukum pidana karya anak negeri”*⁶.

⁵ Urif Syarifudin, DPR Sahkan KUHP Baru dalam Rapat Paripurna ke-8, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.58 WIB

⁶ Mempertanyakan KUHP dan KUHP, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2026, pukul 08.23 WIB

BAB 3

KUHAP-KUHP BARU DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT

A. Selamat Datang KUHAP dan KUHP Baru

Tanggal 2 Januari 2026 menjadi momen penting dalam sistem hukum di Indonesia karena dua aturan besar mulai berlaku secara resmi, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru¹⁸. Kedua kode ini menggantikan aturan lama yang sudah berjalan puluhan tahun dan dirancang untuk menyesuaikan hukum pidana serta prosedur peradilan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Perubahan ini memicu diskusi luas dari berbagai kalangan karena dampaknya yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat.

Pro dan kontra *like and dislike* penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) versi terbaru tanggal 2 Januari 2026 dalam alam demokrasi itu wajar, *“Mengapa kita harus ribu. Relakah kita hingga sampai kiamat kita mempergunakan KUHP dan KUHAP warisan kolonial belanda”*. Kita wajib bersyukur bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

¹⁸ KUHAP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan Dampaknya bagi Masyarakat, <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.01 WIB

BAB

4

UNDANG-UNDANG PENYESUAIAN PIDANA INDONESIA

A. Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana

1. DPR dan Pemerintah Tuntaskan Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana

Regulasi khusus yang mengatur penyesuaian pidana hadir untuk menghindari tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, serta disparitas pemidanaan. DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Proses pembahasan RUU ini relatif sangat cepat, hanya sekitar dua pekan. Keberadaan regulasi penyesuaian pidana ini dinilai mendesak untuk melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026²⁸. UU Penyesuaian Pidana hadir untuk menghindari tumpang tindih aturan, kekosongan hukum, ataupun disparitas pemidanaan.

RUU Penyesuaian Pidana disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (8/12/2025). RUU ini mulai dibahas pada 24 November 2025 ketika Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk

²⁸Nikolaus Harbowo,dkk. Hanya Dua Pekan, DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Penyesuaian Pidana, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.49 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2015
- Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, Hill and Wang, New York, 1976
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2022.
- Arifin, B., Arfarizky, R. A., & Windari, R. (2023). *Perbandingan Konsep Recidive dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Criminal Act of South Korea Abstrak*. 45(2).
- Ashworth, Andrew. "Sentencing and Criminal Justice." Cambridge University Press, 2005.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Bandung: Kencana, 2020.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda, 2015
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group.

- Barda Nawawi Arief. (2012). *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Cetakan IV). Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Damaska, Mirjan, *Evidence Law Adrift*, Yale University Press, 1997.
- Daniel S. Lev, *Colonial Law and The Genesis Of The Indonesian State*
- Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 2024 untuk PN Tipikor se-Indonesia (data internal)
- DIPA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025 (data internal)
- Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, "*Anotasi KUHP Nasional*", RajaGrafindo Persada, Depok, Cetakan ke-3, Mei 2025.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Etzioni, A. (1995), *The Spirit of Community : The Reinvention of American Society*, Simon and Schuster.
- Eugene H, Chesney, *Concept Of Mens Rea In The Criminal Law*, *Journal Of Criminal Law And Criminology*.
- Eugene J. Chesney, "*Concept of Mens Rea in the Criminal Law*", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 29, Issue 5 January, 1939.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkristuti Harkrisnowo, (slide) Materi "Membangun Pardigma Baru Pemidanaan Melalui KUHP Baru& UU Pemasarakatan Baru".
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Kerugian Negara Akibat Korupsi Tahun 2023: Rp56,075 triliun berdasarkan monitoring terhadap 1.649 putusan korupsi*

- Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jeremy Pope. *Confronting Corruption*. Transparency International, 2000.
- Karso, A. Junaedi, Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga-Jawa Tengah, 2025
- Karso, A. Junaedi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tonggak Awal Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, Jawa Tengah, 2025
- Laporan Kasus Suap Hakim Tipikor: Ramlan Comel, DS, Merry Purba, Janner, dan kasus 2025 (DJU, ASB, AM)
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). (2021). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca 2009: Antara Harapan dan Kenyataan*
- M. Yahya, Hukum Pembuktian, Bandung: Alumni, 2015.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mahkamah Agung RI, *Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1986
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI. "Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020." MaPPI FH UI, 2022.
- Materi Penataran KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023) Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana&Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) - FH Univ.Pancasila, Jakarta, 7-9 Februari 2023.
- Mazlumder, M. & Cavusoglu, D. (2016), *Compassion-Based Justice : A Theoretical Model and Ethical Foundation*, *Journal of Human Values*, 25 (3), 204-217.

- Mens Rea, Paul H Robinson, (article). Menyibak Tabir Motif dan Mens Rea dalam Perbuatan Pidana Korupsi
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2021.
- Muladi & Arief, Teori-teori Modern dalam Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2010.
- Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2019.
- National Judicial Stress Task Force, (2020), *Judicial Wellnest Report*, National Center for State Courts.
- OECD. (2022). Specialised Anti-Corruption Courts: A Comparative Mapping. OECD Public Governance Reviews
- Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Scholhuber, Stephen, Modern Evidence Analysis, Chicago Press, 2012.
- Sebastiaan Pompe, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2012)
- Soetandyo Wignjosebroto. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, 2019.
- Suhariyanto, Budi. "Pedoman Pemidanaan dalam Perspektif Reformasi Peradilan." Puslitbang Mahkamah Agung, 2020.

Suharto, "Materi Keynote Speech Acara Konferensi Hukum Nasional: Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi", tanggal 25 Oktober 2023.

Tim Ahli Pembahasan UU KUHP Kementerian Hukum&HAM RI, (slide) Materi "Kebaruan Hukum Pidana", Jakarta, 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), (2019), *Judicial Ethics Training Manual*.

UNODC. Legislative Guide to the United Nations Convention Against Corruption. New York: UN, 2015.

Van Manen, N. (2001). "The Secret of the Court in the Netherlands". *Seattle University Law Review*, 24(2), 569

Von Benda-Beckmann, F., Von Benda-Beckmann, K., & Spiertz, H. (2018). Notaries and legal certainty: A comparative perspective. Berlin: Springer.

Wahyudi, Tri Hidayat. (2020). "Keberadaan dan Peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif kepada Wajib Pajak." *Jurnal Selisik*, 6(1).

Wigmore, John Henry, A Treatise on the Anglo-American System of Evidence, Boston: Little, Brown and Co, 1940.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Online/Website

1 Januari 1918: Berlakunya KUHP Belanda di Nusantara, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.37 WIB

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Perkara Transisi: Pasal Lama vs Pasal Baru KUHP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.05 WIB

- Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Status Keberlakuan PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.31 WIB
- Adji Prakoso, 43 Tahun Lahirnya KUHP, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.14 WIB
- Ady Thea DA, Ini 3 Garis Besar RUU Penyesuaian Pidana, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.31 WIB
- Ady Thea DA, KUHP Nasional Sebagai Legal Framework Pembaruan KUHP, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.34 WIB
- Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno*, Integrasi Reward & Punishment dengan Strategi Kindness: Jalan Etis Menuju Peradilan Agung, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 05.05 WIB
- Alicia Diahwahyuningtyas, dkk. Pidana Kerja Sosial Berlaku Mulai Januari 2026, Siapa yang Bisa Dijatuhi Menurut KUHP Baru, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 19.33 WIB
- Angghara Pramudya, Ketua PN Kepanjen Melaksanakan RAKOR & Sosialisasi KUHP Nasional dan KUHP Baru, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.31 WIB
- Anies Mahanani, Perbedaan Jenis Sanksi Pada KUHP Lama dan KUHP Baru, <https://medikolegal.id> diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 01.36 WIB
- Anies Mahanani, Perbedaan Mendasar KUHP Lama dengan KUHP Terbaru, <https://medikolegal.id>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 01.52 WIB

- Anshary Madya Sukma, KUHP dan KUHP baru berlaku mulai 2 Desember 2025, menyoroti pasal penyadapan, pemblokiran, rehabilitasi disabilitas, keadilan restoratif, dan penguatan advokat, <https://premium.bisnis.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.17 WIB
- Argha Syifa Nugraha, Menelusuri 13 Perbedaan KUHP Lama dan KUHP Baru: Sebuah Kajian Komprehensif, <https://literasihukum.com>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 01.26 WIB
- Asmadi Syam, Dampak Yuridis SPDP Melebihi 7 Hari, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.18 WIB
- Azmi Syahputra, Jaksa dalam Pusaran KUHP Baru: Antara Pengendali Mutu atau Stempel Penyidikan, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 20.16 WIB
- Bagaimana Pemerintah Mengantisipasi Kekosongan Pasal Pidana Narkoba yang Sudah Dicabut di KUHP, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.47 WIB
- Bagus Ahmad Rizaldi, Menkum: KUHP baru berlaku 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP baru, <https://jatim.antaranews.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.03 WIB
- Baharudin Al Farisi, dkk. Polri Nyatakan Terapkan KUHP dan KUHP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB Tadi, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.49 WIB
- Bintoro Wisnu Prasajo, Integrasi Core Crimes Dalam KUHP Nasional: Analisis De Minimis Implikasinya, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 05.47 WIB

- Danu Damarjati, Prabowo Sahkan UU Penyesuaian Pidana, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 19.45 WIB
- Dian Dewi Purnamasari, MA Dukung Rencana Pemerintah Revisi UU Narkotika, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.34 WIB
- Dian Fitri Islamiati Munisah, KUHP dan KUHP Baru: Transformasi Hukum Pidana dan Kesiapan Masyarakat, <https://unmer.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.48 WIB
- Dio Ashar Wicaksana, Memperkuat Posisi Korban dalam Peradilan Pidana, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.04 WIB
- Dr. H. Ikhsan S.H., Sp.N., M.Kn, dkk. KUHP Dan KUHP Baru: Di Persimpangan Sejarah (Unifikasi Prosedur Dan Kodifikasi Keadilan Negara-Warga), <https://www.waspada.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.45 WIB
- Dr. Marsudin Nainggolan, Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.40 WIB
- Dr. Pudjoharsoyo, Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.45 WIB
- Dudi Wahyudi, 2 Upaya Hukum di Pengadilan Pajak: Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Formal, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.34 WIB
- Firmansyah, BNN: Dunia Dibanjiri Narkotika dari Tiga Jaringan Utama, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 22.37 WIB

Fuadil Umam, Kebutuhan Mendesak: Mengapa Revisi KUHAP Harus Menyusul KUHP, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.27 WIB

Guilty Plea Issues, <https://immigrantdefenseproject.org/wp-content/uploads/2014/07/pleas-from-fahey-1.pdf>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.43 WIB

H. A.S. Pudjoharsoy, Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.22 WIB

Hanifah Dwi Jayanti, KUHAP Baru Disahkan Presiden, Dirjen PP: Dua Peraturan Pelaksana Telah Selesai Harmonisasi, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.33 WIB

Hanin Marwah, Mengapa KUHAP Baru Ditentang Banyak Pihak, <https://www.tempo.co>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.57 WIB

Haryanti Puspa Sari, dkk. KPK Siap Patuhi KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 20.33 WIB

Hidayat Salam, Aturan Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHAP Berlaku 2 Januari, Apa Saja Konsekuensinya, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.13 WIB

Hidayat Salam, KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Yusril: Pemerintah Terbuka Masukan Publik, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.40 WIB

<https://dandapala.com/opini/detail/akibat-hukum-pencabutan-pasal-114-uu-narkotika-oleh-kuhp-nasional>, diakses ulang pada pukul 09.45 WIB, 3 Januari 2026.

<https://icjr.or.id/jrkn-sampaikan-catatan-kritis-atas-ruu-penyesuaian-pidana-dalam-rdpu-komisi-iii-dpr-ri>, diakses ulang pada pukul 09.35 WIB 3 Januari 2026

<https://nasional.kompas.com/read/2025/12/02/18260301/ruu-penyesuaian-pidana-selesai-dibahas-apa-saja-yang-diatur?source=headline>, diakses ulang pada pukul 09.45 WIB, 3 Januari 2026.

https://www.kompas.id/Albert_Aries_Menuju_Pembaruan_KUHAP, diakses pada tanggal 5 Januari 2026, pukul 19.00 WIB

Hukum Online, Menilik praktik *plea bargain* di Amerika Serikat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-praktik-plea-bargain-di-amerika-serikat-lt61d47796634ea>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.41 WIB

Ibnu Abas Ali, Menyibak Tabir Motif dan Mens Rea dalam Perbuatan Pidana Korupsi, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.17 WIB

Ibnu Abas Ali-Hakim, Pertautan Delik Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHAP Nasional 2023, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 05.57 WIB

Jefferson Hakim, UU Penyesuaian Pidana: Bagaimana Memahaminya (Bagian Kedua), <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.25 WIB

Kinerja bidang tindak pidana Kejangung 2022, <https://www.antarane.ws.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.02 WIB

KUHAP BARU: Menafsirkan Peralihan Pemeriksaan Acara Biasa Menjadi Acara Singkat, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.38 WIB

- KUHAP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan Dampaknya bagi Masyarakat, <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.01 WIB
- KUHP dan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari, Kejaksaan Siapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.42 WIB
- Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, h. 41.
- M Zaid Wahyudi, Narkoba dan Kesehatan Mental Kita, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.36 WIB
- Marsudin Nainggolan, Pasal 603 KUHP Baru Sebagai Delicta Commune, Delik Materil, Modifikasi Sistem Delphi, dan Core Crime Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 05.52 WIB
- Marsudin Nainggolan, Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 21.54 WIB
- Maskur Hidayat, Mens Rea: Pengertian, Kedudukan dan Penerapan Praktik Peradilan, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.12 WIB
- Memerangi tindak pidana perdagangan orang, <https://ramadhan.antaranews.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 05.57 WIB
- Mohammad Khairul Muqorobin, Sejarah Perkembangan dan masa depan KUHP di Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026 pukul 19.58 WIB

- Muamar Azmar Mahmud Farig, Setelah Minimum Khusus Dihapus, Bagaimana APH Seharusnya Berpikir tentang Pemidanaan, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.27 WIB
- Muhamad Ridwan, UU Penyesuaian Pidana: Jembatan Peralihan KUHP Lama Menuju KUHP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.26 WIB
- Muhammad Yasin, Asal Muasal KUHP Adopsi Prinsip Diferensiasi Fungsi, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.16 WIB
- Nadia Putri Rahmani, dkk. Kejaksan siap laksanakan KUHP dan KUHP baru, <https://jatim.antaranews.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.24 WIB
- Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi, <https://bphn.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.21 WIB
- Nikolaus Harbowo, Penggabungan RUU Narkotika dan RUU Psikotropika untuk Atasi Kelebihan Penghuni Lapas, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 22.42 WIB
- Nikolaus Harbowo, RUU Narkotika Mandek, Pemerintah Siapkan "Pintu Darurat" Antisipasi Kekosongan Hukum, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.56 WIB
- Nikolaus Harbowo, dkk. Hanya Dua Pekan, DPR dan Pemerintah Tuntaskan RUU Penyesuaian Pidana, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.49 WIB
- Novi Mikawensi, Akibat Hukum Pencabutan Pasal 114 UU Narkotika oleh KUHP Nasional, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.24 WIB

- Novianti Setuningsih, dkk. RUU Penyesuaian Pidana: Pemerintah Usul Pidana Kurungan Diganti Denda dan Pidana Minimal Dihapus, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 22.56 WIB
- Nur Amalia Abbas, KUHP Nasional 2026: Transformasi Hukum Pidana Indonesia, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.07 WIB
- Nur Khabibi, KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Penegakan Hukum Masuki Era Baru, <https://www.sindonews.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.51 WIB
- Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru: Penyesuaian Pidana Lebih Ringan, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/hukum-pidana>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.20 WIB
- Penanganan tindak pidana korupsi 2023, <https://www.antaraneews.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 06.00 WIB
- Perjalanan Panjang RKUHP di Indonesia, <https://indonesiabaik.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.25 WIB
- Pradikta Andi Alvat, Revisi KUHP: Memperkuat Due Proces of Law, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 22.21 WIB
- Rafi Muhammad Ave, Meninjau Penguatan Peran Hakim Wasmat dalam Paradigma KUHP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.35 WIB
- Rahel Narda Chaterine, dkk. Wamenkum: RUU Penyesuaian Pidana adalah Perintah KUHP, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.50 WIB
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Naskah Final Paripurna).

- Riki Perdana Raya Waruwu, Urgensi Pembaruan KUHAP: Mengapa Kita Membutuhkannya, <https://marinews.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.12 WIB
- Rini Kustiasih, Revisi UU Narkotika Buka Peluang Atasi Kelebihan Kapasitas Lapas, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 22.39 WIB
- Robert Tarigan, Syarat Hukuman Mati Berubah Jadi Seumur Hidup UU Penyesuaian Pidana, <https://karosatuklik.com>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, diakses pada tanggal 22 Januari 2026, pukul 05.40 WIB
- Romi Hardika, 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru, Hakim Wajib Tahu, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 21.52 WIB
- Romi Hardika, 12 Perubahan Prosedur Persidangan di KUHAP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.14 WIB
- Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Kompleksitas Norma Pengakuan Bersalah dalam Kaca Mata Harmoni, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.58 WIB
- Satrio Pangarso Wisanggeni, dkk. "Solusi" Damai Rugikan Korban Pemerkosaan, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 19.59 WIB
- Satrio Pangarso Wisanggeni, dkk. Vonis Ringan Pemerkosa dan Budaya Hukum yang Tak Memihak Korban, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 19.43 WIB
- Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP, <https://reformasikuhp.org>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.32 WIB

- Singgih Wiryono, dkk. Kritik KUHAP Baru, Guru Besar UI: Kita Masih Negara Hukum Atau Tidak, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 06.55 WIB
- Songga Aurora Abadi, KUHP Baru dan Problematika Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Transisi Hukum Nasional, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Januari 2026, pukul 21.09 WIB
- Sunoto, S.H.,M.,H, 15 Tahun Pengadilan Tipikor, Saatnya Bangkit untuk Keadilan Substantif, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 05.49 WIB
- Susana Rita Kumalasanti KUHAP Baru dan Kekhawatiran Polisi Jadi Superpower, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.16 WIB
- Susana Rita Kumalasanti, dkk. Penerapan KUHP dan KUHAP Baru secara Terburu-buru Pertaruhakan Nasib Warga, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.23 WIB
- Taufiqurahman, Pimpinan MA dan Pakar Hukum Berkumpul Susun Kurikulum Pelatihan KUHP Baru, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.32 WIB
- Titania Nurrahim, Perjalanan Panjang RKUHP di Indonesia, <https://indonesiabaik.id>, diakses pada tanggal 2 Januari 2026, pukul 20.12 WIB
- Tri Hantoro, KPK Tegaskan Tunduk pada KUHP dan KUHAP Baru yang Resmi Berlaku Hari Ini, Arah Penindakan Berubah, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul <https://video.tribunnews.com>, 08.26 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Baru di RUU Penyesuaian Pidana: Pemberian Obat Penggugur untuk Korban Pemerkosaan Tak Dipidana, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 22.53 WIB

- Tria Sutrisna, dkk. DPR-Pemerintah Rampung Bahas 196 DIM RUU Penyesuaian Pidana, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 22.49 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. DPR-Pemerintah Sepakat Atur Pencabutan Hak Profesi Bagi Pelaku Kejahatan Berulang di RUU Penyesuaian Pidana, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.22 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. ICJR Usul RUU Penyesuaian Pidana Bedakan Hukuman Pengguna dan Pengedar Narkoba, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.53 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Pasal Pidana Narkotika Akan Masuk RUU Penyesuaian Pidana Usai Dicabut di KUHP, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.45 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Pemerintah Usul RUU Penyesuaian Pidana Wajibkan Masa Percobaan 10 Tahun bagi Terpidana Mati, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 22.59 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Penyesuaian Pidana Jadi Undang-Undang, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.43 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. RUU Penyesuaian Pidana Selesai Dibahas, Apa Saja yang Diatur, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 19.49 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Sekilas soal RUU Penyesuaian Pidana yang Segera Disahkan DPR, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.46 WIB
- Tria Sutrisna, dkk. Usul Hapus Pidana Minimum Narkoba di RUU Penyesuaian Pidana, Pemerintah Setuju, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.17 WIB

Tria Sutrisna, dkk. Usulan di RUU Penyesuaian Pidana: Kasus Narkoba Tidak Dihukum Mati, <https://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026 pukul 21.20 WIB

Trubus Rahardiansah, Guru Besar Trisakti: KUHP-KUHAP Baru Jadi Tonggak Kedaulatan Hukum Indonesia, <https://katadata.co.id>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025, pukul 19.12 WIB

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Understanding a Waiver of Rights: Definition and Sample Use Cases, <https://www.upcounsel.com/waiver-of-rights-sampl>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 04.40 WIB

Urif Syarifudin, DPR Sahkan KUHAP Baru dalam Rapat Paripurna ke-8, <https://dandapala.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 07.58 WIB

Willa Wahyuni, Mengenal Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP Nasional, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2025, pukul 08.29 WIB

Willa Wahyuni, Resmi Berlaku! Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 10.06 WIB

Willy Medi Christian Nababan, Penyelesaian "Damai" Kasus Pemerkosaan Bisa Memperparah Trauma Korban, <https://www.kompas.id>, diakses pada tanggal 3 Januari 2026, pukul 20.01 WIB

Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1986, Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: Mahkamah Agung RI

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7,8, dan 9 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris dan PPAT.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan yang Menjadi Sasaran Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara untuk Jaksa

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006

Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso

Adalah seorang akademisi dan advokat yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Universitas Wirladora Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Universitas Pramita Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH Universitas Sumatera Utara Medan (lulus tahun 2020) dan S3 Universitas Satyagama FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun

2020, Sertifikasi Kompetensi Asesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaan Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhans Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah

Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International KAN tahun 2021.

Karya yang berupa buku adalah sebagai berikut : Buku Ajar Dasar dasar Ilmu Sosial; Buku Ajar Dasar Dasar Ilmu Politik; Buku Ajar Pemerintah Nasional; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan Versi Kedua; Buku Ajar Antikorupsi; Buku Ajar Master Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Politik Pertahanan dan Keamanan; Buku Ajar Politik Hukum Indonesia; Buku Ajar Hukum Tata Pemerintahan; Buku Ajar Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Buku Ajar Good Governance; Buku Aja Etika Politik Pemerintahan; Buku Ajar Ekonomi Politik; Buku Ajar E Government; Buku Ajar Sistem Sosial Politik Indonesia; Buku Ajar Sektor Pelayanan Publik di Indonesia; Buku Ajar Konstitusi dan Kelembagaan; Buku Ajar Kebijakan Sektor Publik; Buku Ajar Manajemen Konflik; Buku Ajar Negosiasi Politik di Indonesia; Buku Ajar Media dan Demokrasi di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Pancasila; Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Ajar Hukum Administrasi Negara; Buku Ajar Komunikasi Pemerintahan di Indonesia; Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Bagi Aparatur Desa Indonesia; *Implementation Of Good Corporate Governance To Secure Assets n State Owned Palm Oil Plantation Companies And Privately Owned Companies In*

Indonesia; Buku Kinerja Kejaksaan Agung Kolaboras Penegak Hukum Dalam Memperbaiki Wajah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; E Commerce Datang Warung Tradisional Hilang; Mengukur Peta Pertarungan Kekuatan Politik Di Pulau Jawa Netralitas Apartur Negara Pada Pilpres 2024 Ketimpangan Ekonomi Jawa Barat Dibawah Kepemimpinan Ridwan Kamil; Perang Israel Palestina Peran Serta Indonesia Dalam Mewujudkan Kemerdekaan PalestinaKontribusi Bantuan Kemanusiaan Muhammadiyah Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional and Nasional; Pembangunan Proyek Food Estate Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia Antara Untung and Rugi; Menanti Dasyatnya Bunyi Ketukan Palu Majelis Kehormatan_Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Soal Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024; Penerapan Good Corporate Governance Untuk Pengamanan Aset Pada Perusahaan Kebun Sawit Di Perusahaan Milik Negara Bumn Perusahaan Swasta Di Indonesia; Pengakuan Negara Terhadap Kedudukan Hukum Adat dalam UUD 1945; Sekilas Info Indonesia Berduka Akibat Ulah Firli Bahur Panglima Perang KPK Di Indonesia Sengkarut Di Pusaran Internal Dijerat Pasal Dugaan Pemerasan Terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode; Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Terwujudnya Indonesia Menuju Negara Maritim Dunia Yang Tangguh; Seputar Lintas Kejahatan Realita Antara and Kamufalse Pidana Berdasarkan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Polri di bawah Kementerian dalam Negeri antara Politik atau Pelemahan Institusi; Perencanaan Strategik dalam Menyiapkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Profesional dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital 40; Peranan dan Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam

pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Risk Manajemen Good Corporate Governance Pengamanan terhadap pencurian TBS di Perkebunan berdasarkan UU Perkebunan No 39 Tahun 2014; Peranan dan Upaya Upaya Badan Narkotika Nasional BNN dalam Pemberantasan Pencegahan Kejahatan Narkotika di Indonesia; Peran Fungsi Kedudukan Kepolisian dalam pemerintahan penegakan hukum dan kolaborasi pemberantasan Korupsi di Indonesia; Pengaruh Kepemimpinan Profesionalisme Dan Komitmen Anggota Polri Terhadap Kinerja Divisi Propam Polri; Pengaruh Implementasi Manajemen Pemerintahan Terhadap Kinerja Peran dan Fungsi Camat di Indonesia; Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemda terhadap perkawinan antar warga Di Dalam Pembangunan Perekonomian Sosial Budaya Di Kabupaten Indramayu; Pengantar Tata Hukum Pemerintahan and Dasar dasar Tata Negara di Indonesia; Penerapan Good Corporate Governanance GCG Untuk Pengamanan Aset Perusahaan; Pembangunan transportasi tol laut dalam mewujudkan Indonesia yang makmur menuju poros maritim dunia; Perkawinan campuran dan Kesejahteraan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat; Membangun kualitas pelayanan administrasi pertanahan studi pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Anjatan Indramayu; Lintasan Pandangan Mata Yang Remang-Remang Tentang Dilema Indonesia Lumbung Sawit Dunia; Legalitas Perkawinan Antar Warga Negara Di Kecamatan Anjatan Indramayu; Ketegasan Polri and Penegakan Hukum dalam Membuka Tabir Hitam Kekejaman Ferdy Sambo; Kereta Api Trans Sulawesi antara Pengguna Transportasi and Ekonomi Masyarakat; Implementasi Analisis Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia; Implementasi KSOP sebagai Kepala Pemerintahan di Laut; Hukuman Mati Bagi Koruptor Penghisap Bantuan Sosial Untuk Rakyat Miskin Dimasa Covid 19; Gagasan Perubahan Perizinan Transportasi Laut; Dasyatnya Money Politik Pilkades Pilwu di Indramayu; Inggris pusat aktivitas judi online terbesar di dunia versus Indonesia terpapar; penerapan e government eoffice sistem perencanaan

pembangunan di daerah; Sumbangsih Smart E Government Artificial Intelligence Di Indonesia; RUU TNI Anak Kandung Rakyat Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; RUU Polri Rakhmat Bagi Indonesia Solus Populis Suprema Lex Esto; Revisi Undang Undang Tni Polri Vs Penempatan Jabatan Sipil Di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya Palmco Sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Menyongsong Kota Metropolitan: Teori dan Praktik Pengembangan Kawasan dan Pertumbuhan Ekonomi; Tendensi Politik Regional 2024: Money Politics, Police Power Politics, and Local Democracy; Revisi Undang-Undang TNI Polri VS Penempatan Jabatan Sipil di Indonesia; Sekilas Pandangan Lahirnya PalmCo sebagai Produsen Terbesar Kelapa Sawit Dunia; Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif; Dampak Presidential Threshold, Problematika & Solusinya dalam Pemilu; di Indonesia; Pensertifikatan Tanah di Indonesia di antara Kendala dan Problematika : Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Ambang Batas Parlemen dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019-2024 versus Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024; Presidential Threshold di Indonesia : Antara Positif, Negatif & Solutif; Parlemetary Threshold di Indonesia antara Positif & Negatif; Pemagaran Laut Tangerang, Kedaulatan Negara Versus Potensi Laut & Sejarah Maritim Indonesia; Tragedi & Dampak Kerugian Kebakaran di Los Angeles Amerika Serikat; Bulan Ramadhan antara Libur Sekolah & Sejarahnya di Indonesia; Ketokan Palu MK Mengubah Jalan Presidential Threshold di Indonesia; Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto Menuju Indonesia Emas 2045; Presiden Prabowo Jabatan & Kekuasaan Milik Rakyat Berantas Korupsi Hingga ke Akar-Akarnya; Kewenangan Kejaksaan Superbody, Membunuh Kewenangan Polri-KPK; Program Pendidikan Deep Learning, Penerapan Artificial Intelligence di Indonesia; Sekilas Program Astacita Prabowo di Sektor Pertanian; Gebrakan Sang Jenderal Genius Prabowo di

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang, Team Hukum PTPN IV (Palmco).

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email Bintang.lyatiara66@gmail.com, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

LAMPIRAN



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENYESUAIAN PIDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;
- b. bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana yang konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri;
- c. bahwa penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam setiap Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penyesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendesak dilakukan sebelum berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA.**

BAB I

**PENYESUAIAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pasal I

- (1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus.

(2) Ketentuan . . .